

## Ideologi dalam slogan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi UU Pilkada: Analisis wacana kritis Norman Fairclough

*Ideology in the slogans of student demonstration actions against the revision of the regional election law:  
A critical discourse analysis by Norman Fairclough*

Efaphras Cinta Tyas Gusti<sup>1,\*</sup> & Eti Setiawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Brawijaya

Jalan Veteran, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

<sup>1,\*</sup>Email: [efatyas@student.ub.ac.id](mailto:efatyas@student.ub.ac.id); Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0000-0444-6518>

<sup>2</sup>Email: [ety64@ub.ac.id](mailto:ety64@ub.ac.id); Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-0314-2197>

### Article History

Received 15 November 2024  
Revised 14 January 2025  
Accepted 30 January 2025  
Published 7 March 2025

### Keywords

ideology; demonstration slogan;  
revision of the Pilkada Law;  
critical discourse analysis.

### Kata Kunci

ideologi; slogan demonstrasi;  
revisi UU Pilkada; analisis  
wacana kritis.

### Read online

Scan this QR  
code with your  
smart phone or  
mobile device to  
read online.



### Abstract

This research aims to discuss the ideology of discourse that appears in the slogans of student demonstrations. The research method used is descriptive qualitative. Data in the form of slogan discourse was taken from social media X. The data analysis technique uses Norman Fairclough's critical discourse analysis approach, which focuses on three dimensions: the text dimension, discourse practice, and sociocultural. The results showed that in the text dimension, a form of clause representation was found in the form of using metaphors as an affirmation of meaning, such as *dikremasi*, *tukang kayu*, *disandera*, and *mengebiri*. Religious vocabulary that shows moral values, such as *halal*, *Yesus*, and *azab*. The representation in the combination of clauses illustrates the coherence shown by the form of elaboration marked by the conjunctions: *yang* and *tanpa*. The analysis of the discourse practice dimension shows that the author of the slogan, namely students, plays a role as a driver of anti-political dynasty ideology. In the sociocultural dimension, a situational level was found where the slogan discourse was influenced by the condition of the community that was disturbed by the issue of political dynasties ahead of the 2024 regional head elections.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membahas ideologi wacana yang muncul pada slogan aksi demonstrasi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data berupa wacana slogan diambil dari media sosial X. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks ditemukan bentuk representasi anak kalimat berupa penggunaan metafora sebagai penegasan makna, misalnya *dikremasi*, *tukang kayu*, *disandera*, dan *mengebiri*. Kosakata keagamaan yang menunjukkan nilai moral, misalnya *halal*, *Yesus*, dan *azab*. Representasi dalam kombinasi anak kalimat menggambarkan adanya koherensi yang ditunjukkan dengan bentuk elaborasi yang ditandai kata hubung *yang* dan *tanpa*. Analisis dimensi praktik wacana menunjukkan bahwa penulis slogan, yaitu mahasiswa berperan sebagai penggerak ideologi anti dinasti politik. Pada dimensi sosiokultural ditemukan tingkatan situasional di mana wacana slogan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang diresahkan dengan isu dinasti politik menjelang pemilihan kepala daerah 2024.

© 2025 The Author(s). Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya by Universitas Mulawarman

### How to cite this article with APA style 7th ed.

Gusti, E. C. T., & Setiawati, E. (2025). Ideologi dalam slogan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi UU Pilkada: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(1), 197—212. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i1.1134>



## A. Pendahuluan

Praktik dinamika demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ideal. Demokrasi Pancasila seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam tata kelola negara (Ningsih et al., 2023). Dalam demokrasi yang ideal, kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat tanpa adanya dominasi kelompok tertentu. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang sejak era Reformasi, masih banyak tantangan yang menghambat terciptanya demokrasi ideal. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah fenomena dinasti politik yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Dinasti politik mengacu pada hubungan kekerabatan yang akan memperkuat kedudukan seseorang di dalam politik (Susanti, 2018). Hal itu membuat distribusi kekuasaan politik menjadi tidak merata, sehingga menyalahi prinsip demokrasi yang ada. Fenomena tersebut juga bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menegaskan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus diutamakan dalam setiap keputusan politik.

Fenomena melemahnya demokrasi semakin mendapat sorotan publik dan ramai diperbincangkan seperti pada media sosial X. Melalui media sosial tersebut, banyak orang mengungkapkan pandangannya terkait isu demokrasi, salah satunya adalah kritik terhadap dinasti politik dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Aksi-aksi demo mahasiswa yang ramai diperbincangkan di media sosial X, lengkap dengan slogan-slogan protes yang mereka suarakan merupakan cerminan keresahan publik terhadap kondisi demokrasi saat ini. Sebagai bentuk wacana, slogan memiliki bentuk yang sama dengan iklan atau poster politik yang memadukan elemen verbal dan visual (Kreil, 2021). Slogan tidak hanya sekadar ungkapan emosional, tetapi juga merupakan bagian dari wacana persuasif yang sarat dengan ideologi. Hal ini selaras dengan pendapat Lesmana & Hidayatullah (2021) yang menyatakan bahwa slogan berfungsi sebagai media wacana tulis yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemikiran dan opini publik. Dalam konteks demonstrasi, mahasiswa berusaha mengungkapkan keresahan mereka terhadap berbagai isu, salah satunya terkait ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan hak-hak politik rakyat yang melemahkan prinsip demokrasi.

Dengan menghimpun informasi dari media sosial X, pada bulan Agustus 2024 muncul aksi demonstrasi yang dipicu oleh revisi UU Pilkada. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan pencalonan kepala daerah menuai kritik karena dianggap melemahkan prinsip demokrasi partisipatif. Dalam aksi-aksi ini, mahasiswa menggunakan berbagai slogan yang diunggah dan didiskusikan secara luas di media sosial X. Sejalan dengan pendapat Lou & Jaworski (2016) yang menyatakan bahwa selain bentuk fisiknya yang dapat dibawa, slogan dapat direproduksi dan direkontekstualisasi dengan diunggah ke media sosial untuk dimanfaatkan secara lebih luas. Slogan tersebut tidak hanya mencerminkan penolakan mahasiswa terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga mengandung makna ideologis terkait dengan hak asasi, keadilan, dan kebebasan politik. Studi terhadap slogan-slogan demonstrasi ini relevan dalam kajian bahasa karena slogan sebagai bentuk wacana yang menggambarkan proses negosiasi makna antara penutur dan audiensnya. Wacana dalam slogan dapat dianalisis untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ideologi dan memengaruhi persepsi publik (Mudiawati et al., 2023). Dalam perspektif linguistik, analisis terhadap struktur bahasa, pilihan kata, dan strategi yang digunakan dalam produksi slogan memungkinkan untuk memahami ideologi yang berkembang di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Gambaran ideologi tentang aksi demonstrasi dari cuitan-cuitan di media sosial X itu dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Fairclough (1995) menggunakan kerangka teoretis yang memungkinkan untuk membedah ideologi dalam bahasa yang digunakan, termasuk dalam wacana slogan-slogan aksi demonstrasi. Sejalan dengan pendapat Eriyanto (2015) yang menyatakan bahwa wacana dapat dihubungkan dengan relasi antar-institusi, sehingga ideologi yang terdapat dalam wacana slogan demonstrasi mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari konteks politiknya. Analisis wacana kritis tidak hanya berfokus mempelajari wacana sebagai kajian bahasa, tetapi juga melihat

cara bahasa dikaitkan dengan konteksnya untuk mencapai tujuan praktis tertentu, termasuk untuk menyampaikan kritik.

Kondisi penyampaian kritik melalui wacana slogan dikaji dengan menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough yang membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi teks, dimensi diskursus, dan dimensi praktik sosial (Samsuri et al., 2022). Dalam penelitian ini, dimensi teks berfokus pada analisis bahasa yang terdapat dalam slogan-slogan demonstrasi mahasiswa yang ditemukan pada media sosial X. Menurut Fransisca (2023) dimensi teks mencakup analisis terhadap struktur kata, pemilihan diksi, gaya bahasa, dan makna implisit yang terdapat dalam tulisan. Analisis dimensi teks dalam slogan demonstrasi digunakan untuk memahami cara mahasiswa menyampaikan perlawanan mereka. Melalui analisis dimensi teks dapat diketahui bahwa kosakata dan frasa dalam wacana slogan digunakan untuk menyindir pemerintah selaku penentu kebijakan (Hasibuan & Khairani, 2021).

Adapun analisis dimensi diskursus berfokus pada bagaimana sebuah wacana merepresentasikan diskursus tertentu. Analisis dimensi diskursus akan menghubungkan teks dengan konteks sosial dan politik seperti ideologi, nilai-nilai, dan kepentingan yang berpengaruh terhadap proses pembentukan teks (Sasmitha, 2023). Dalam konteks penolakan terhadap Revisi UU Pilkada, slogan yang digunakan mahasiswa menjadi alat untuk memobilisasi dukungan dan membentuk opini publik terkait demokrasi dan hak politik rakyat. Pada tahap ini, diteliti segala proses yang dilalui mahasiswa, yang berhubungan dengan produksi teks. Seperti pada penelitian oleh Alam (2018) yang melihat produksi teks wacana berita Pilkada lebih dominan ke arah sensasionalitas.

Analisis dimensi praktik sosial difokuskan pada dampak dan implikasi dari penggunaan bahasa serta perubahan kebijakan yang mendasari munculnya wacana (Qorib & Aminulloh, 2017). Dalam situasi maraknya penolakan Revisi UU Pilkada, slogan-slogan mahasiswa yang ditemukan pada media sosial X tidak hanya mencerminkan ideologi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan untuk memengaruhi opini-opini yang muncul di masyarakat seperti pada penelitian oleh (Muttaqin & Sriyono, 2021). Analisis dimensi praktik sosial akan mengeksplorasi dampak dan implikasi praktik bahasa slogan aksi demonstrasi dalam masyarakat.

Penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan bahasa dalam slogan aksi demonstrasi dengan isu-isu besar seperti kekuasaan politik dan demokrasi lokal, yang belum banyak dijadikan fokus dalam penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ideologi yang terkandung pada slogan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap penolakan revisi UU Pilkada 2024, ditinjau dari tiga dimensi, yaitu dimensi teks, diskursus, dan praktik sosial. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ideologi dominan yang mendasari slogan-slogan tersebut, serta bagaimana wacana tersebut direproduksi dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan ideologi yang terkandung dalam wacana. Data utama dalam penelitian ini adalah slogan-slogan aksi demonstrasi mahasiswa yang diambil dari media sosial X pada bulan Agustus 2024. Peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dengan menelusuri tagar 'Peringatan Darurat' dan 'Kawal Putusan MK,' peneliti mengunduh data berupa foto slogan penolakan revisi UU Pilkada dari beberapa akun secara acak. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang membagi menjadi beberapa tahap, yaitu (1) proses deskripsi, (2) proses interpretasi, dan (3) proses eksplanasi (Fairclough, 1995). Proses deskripsi untuk menguraikan isi teks berupa kosakata, tata bahasa, pilihan diksi, gaya bahasa, dan makna implisit dalam slogan-slogan yang digunakan mahasiswa. Proses interpretasi digunakan untuk menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi teks, termasuk bagaimana slogan-slogan tersebut merepresentasikan

kepentingan mahasiswa dalam menolak Revisi UU Pilkada. Tahap terakhir, yaitu proses eksplanasi untuk menjelaskan hasil penafsiran pada dimensi kedua yang menghubungkan produksi teks dengan praktik sosialnya, termasuk mengeksplorasi dampak sosial dan politik dari penggunaan slogan dalam aksi demonstrasi pada media sosial X.

### C. Pembahasan

Penelitian ini menemukan adanya wacana tertulis yang tidak hanya berfungsi sebagai representasi pandangan mahasiswa, tetapi juga mencerminkan ideologi yang mendasari aksi protes terhadap revisi UU Pilkada. Ideologi ini termanifestasikan dalam slogan-slogan yang disebarluaskan melalui media sosial X dan dalam aksi demonstrasi pada Agustus 2024. Untuk mengkaji ideologi yang terkandung dalam slogan-slogan tersebut, peneliti menganalisisnya berdasarkan tiga dimensi yang dikembangkan oleh Norman Fairclough.

#### 1. Dimensi Teks

Pada tahap ini, teks dianalisis secara linguistik meliputi kosakata, gramatika, kohesi, koherensi, sintaksis, semantik, dan penggunaan metafora (Haryatmoko, 2016).

**Tabel 1. Data Tekstual Representasi Kritik Sosial dalam Metafora**

No.	Nomor Data	Wacana
1.	DKM 1.2	Demokrasi <b>Dikremasi!</b> Mari Bung Rebut Kembali!
2.	DKM 2.3	Jangan Mentang-Mentang <b>Tukang Kayu</b> Semua Partai Mau <b>Digergaji!</b>
3.	DKM 3.6	Negara <b>Disandera</b> , Saatnya Bersuara!
4.	DKM 4.8	Miris! Punya Pemerintah Urat Malunya Sudah Putus Terang-Terangan <b>Mengebiri</b> Demokrasi. Rakyat Melawan!

Data-data pada Tabel 1 menunjukkan adanya penggunaan metafora yang bertujuan untuk membingkai ideologi dan memperkuat makna dalam wacana (Chatti, 2019). Dalam data DKM 1.2, kata *dikremasi* secara semantik merujuk pada cara penguburan jasad manusia melalui proses pembakaran (Sabandar et al., 2023). Kata *dikremasi* merupakan bentuk kata kerja pasif yang memfokuskan pandangan audiens pada pihak yang menerima tindakan, yaitu *demokrasi*. Hal ini sejalan dengan pendapat Permita (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan kalimat aktif dan pasif akan memengaruhi fungsi nomina dalam kalimat, bisa berperan sebagai pelaku atau sebagai korban. Dalam konteks demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada, penggunaan metafora *dikremasi* hendak menyamakan konsep demokrasi sebagai korban, yaitu seperti jasad manusia yang dibakar. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk opini publik bahwa demokrasi di Indonesia telah mati atau tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Hancurnya demokrasi yang digambarkan dalam anak kalimat pertama menandai munculnya urgensi ajakan pada anak kalimat kedua, yaitu *mari Bung rebut kembali*. Penggunaan kata *mari* menunjukkan bahwa kalimat tersebut termasuk kalimat imperatif yang mengajak pembaca untuk bertindak. Sementara itu, penggunaan kata *Bung* dalam frasa “mari Bung” memiliki makna sapaan akrab untuk mengurangi jarak asing antara pembicara dan lawan bicaranya (Rolya, 2022). Kata *Bung* juga digunakan sebagai sapaan kepada tokoh besar negara, misalnya Bung Karno dan Bung Tomo yang keduanya merupakan pejuang kemerdekaan. Dalam konteks yang membingkainya, kata *Bung* (data DKM 1.2) menunjukkan bahwa penulis menempatkan dirinya sebagai bagian dari komunitas perjuangan. Wacana ini merepresentasikan upaya untuk melawan ketidakadilan terhadap sistem yang merusak demokrasi pada Pra-Pilkada 2024. Penulis slogan tersebut berusaha membangun relasi dengan masyarakat melalui kosakata yang membangkitkan kesadaran dan menumbuhkan rasa solidaritas.

Adapun kata *digergaji* (DKM 2.3) sebagai penanda linguistik yang memiliki nilai metafora. Sebagai kata kerja pasif, kata *digergaji* digunakan untuk menempatkan frasa *semua partai* sebagai objek penerima tindakan. Secara semantik, gergaji memiliki makna perkakas pemotong atau

pembelah kayu. Ungkapan *digergaji* dalam konteks ini tidak merujuk pada makna literal, melainkan mengandung makna konotatif yang menggambarkan tindakan dikendalikan. Tindakan ini berhubungan dengan kekuasaan yang digunakan untuk menghambat partai di luar koalisi agar tidak dapat mencalonkan kandidatnya pada Pilkada 2024. Hal menarik dari wacana ini, yaitu munculnya penggunaan frasa *Tukang Kayu* sebagai pelaku tindakan yang merujuk pada sosok Jokowi. Ungkapan *tukang kayu* mengandung referensi terhadap latar belakang Jokowi yang dikenal sebagai pengusaha mebel sebelum menjabat sebagai presiden periode 2014-2024 (Handarini et al., 2018). Wacana pada data (DKM 2.3) menunjukkan adanya relasi konflik yang muncul antara mantan presiden Jokowi sebagai aktor dominan dan partai-partai politik sebagai pihak yang terdampak. Penulis slogan tersebut mengidentitaskan dirinya sebagai penyalur aspirasi partai politik yang terkena dampak kebijakan, sehingga wacana slogan tersebut merepresentasikan kritik terhadap pengaruh dominan Jokowi dalam politik. Hal ini didukung oleh adanya frasa *jangan mentang-mentang* sebagai ungkapan ketidaksetujuan. Dengan mengawali kalimat menggunakan *jangan mentang-mentang*, penulis memberikan penekanan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh figur tertentu, dalam hal ini Presiden Jokowi yang diwakili melalui metafora *tukang kayu*, tidak semestinya digunakan untuk *menggergaji* atau menghambat partai-partai lain.

Kata *disandera* (DKM 3.6) memiliki fungsi yang sama dengan ungkapan metafora pada wacana sebelumnya, yaitu sebagai kosakata pasif yang menandai bentuk keadaan. Kata *sandera* secara leksikal bermakna orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan. Adapun kata *negara* dalam struktur kalimat tersebut berfungsi sebagai subjek yang menerima tindakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tarmini & Sulistyawati (2019) bahwa objek dalam kalimat dapat berubah menjadi subjek apabila menjadi kalimat pasif. Perubahan ini bertujuan untuk memfokuskan audiens pada keadaan yang sedang terjadi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada negara. Konsep abstrak *negara* diperlakukan seolah-olah sebagai entitas hidup yang bisa disandera. Penggunaan metafora *disandera* pada *negara* dalam konteks ini memperjelas pandangan bahwa negara sedang berada di bawah kendali pihak tertentu. Struktur kalimat ini juga menampilkan urgensi tindakan, yang diperkuat melalui frasa imperatif *saatnya bersuara!* Ajakan ini mempertegas maksud penulis untuk memotivasi masyarakat agar tidak tinggal diam, tetapi turut menyuarakan pendapat mereka dalam menghadapi situasi atau kebijakan masa Pilkada 2024 yang dianggap merugikan negara. Wacana ini berusaha membangun relasi dengan masyarakat, yaitu dengan merepresentasikan sebuah panggilan untuk bertindak terhadap kedaulatan negara yang sedang terancam.

Pada DKM 4.8, penggunaan kata *mengebiri* menjadi metafora untuk menggambarkan tindakan pemerintah terhadap demokrasi. Secara literal, kata *mengebiri* bermakna menghilangkan kemampuan reproduksi pada makhluk hidup, khususnya hewan, melalui prosedur tertentu. Dalam konteks wacana ini, *mengebiri* mengandung makna konotatif berupa tindakan yang membatasi atau bahkan menghilangkan kekuatan dan fungsi demokrasi. Berbeda dengan ungkapan metafora pada wacana-wacana sebelumnya yang berbentuk kata kerja pasif, kata *mengebiri* tampil sebagai kata kerja aktif. Penggunaan kata kerja aktif ini menandai bentuk tindakan yang menggambarkan adanya aktor yang melakukan tindakan terhadap korban, sehingga yang difokuskan adalah subjeknya (Eriyanto, 2015). Struktur kalimat menampilkan *pemerintah* sebagai subjek atau pelaku tindakan, sedangkan *demokrasi* sebagai objek yang menerima tindakan. Pemerintah direpresentasikan sebagai pelaku yang secara terang-terangan atau terbuka melakukan tindakan melemahkan fungsi demokrasi. Representasi itu didukung dengan adanya ungkapan kata *miris* dan *urat malunya sudah putus* sebagai konotasi negatif yang digunakan untuk mempertegas kritik dalam wacana. Penulis slogan tersebut menyoroti tindakan pemerintah yang dianggap sudah melewati batas etis dalam merumuskan kebijakan Pilkada 2024. Kalimat tersebut diakhiri dengan klausa *Rakyat Melawan!* untuk memperkuat pesan ideologis yang hendak disampaikan penulis wacana, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perlawanan terhadap kebijakan yang melemahkan fungsi demokrasi. Kata *mengebiri* dan *melawan* merupakan makna yang menimbulkan hubungan sebab akibat, salah satu fitur linguistik yang mempunyai pemaknaan kontekstual (Wenda et al., 2022). Hubungan sebab akibat wacana tersebut dapat dideskripsikan sebagai sebab

yang ditunjukkan dengan kata *mengebiri* dan akibat dari tindakan tersebut yang ditandai dengan kata *melawan*.

Struktur kalimat pada DKM 4.8 secara berurutan menampilkan sebuah pola, di antaranya yang pertama menampilkan situasi moral pemerintah yang direpresentasikan melalui ungkapan *urat malunya sudah putus*. Kemudian adanya tindakan terhadap demokrasi yang ditandai dengan penggunaan metafora *mengebiri* untuk menunjukkan kecaman terhadap pemerintah. Penulis hendak menciptakan relasi dengan rakyat, yaitu mengajak audiens untuk menyadari tindakan pemerintah yang tidak bermoral. Kalimat diakhiri dengan pola munculnya dorongan perlawanan dari rakyat sebagai dampak adanya tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap demokrasi. Melalui penggunaan kata *melawan*, penulis tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pengamat atau penyalur kritik, tetapi sebagai pihak yang ikut dalam perlawanan. Penulis seolah bertindak sebagai juru bicara atau wakil bagi rakyat yang ingin mempertahankan demokrasi serta mengundang pembaca untuk bersatu dalam perlawanan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Suriadi & Baharman (2024) yang menyatakan bahwa munculnya metafora dalam wacana menunjukkan adanya pemberian label negatif kepada pihak tertentu. Penggunaan metafora dapat menggiring pembaca pada pemaknaan yang dikehendaki pembuat wacana. Suriadi & Baharman (2024) menyimpulkan bahwa metafora digunakan untuk memberikan identitas tertentu pada suatu individu, seperti politisi yang dianggap bermasalah. Berbeda dengan penelitian ini yang menemukan bahwa metafora lebih banyak digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Meskipun sasaran pemaknaannya berbeda, keduanya menggarisbawahi bahwa penggunaan metafora berfungsi untuk memberi penekanan terhadap keburukan, baik pada individu maupun tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai fungsi metafora dalam wacana protes, khususnya dalam membangun narasi kritik terhadap tindakan tertentu.

Selain sebagai representasi kritik sosial, wacana slogan demonstrasi juga merepresentasikan nilai-nilai moral. Representasi yang ditonjolkan penulis dari penggunaan kosakata bernuansa agama bertujuan untuk menambah legitimasi moral pada kritik yang disampaikan. Dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan agama, dapat dilihat upaya penulis untuk mengasosiasikan isu politik dengan nilai-nilai yang diyakini benar secara agama. Data tekstual representasi nilai moral dalam kosakata agama dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Data Tekstual Representasi Nilai Moral dalam Kosakata Agama**

No.	Nomor Data	Wacana
1.	DKA 2.5	Keluarga Oligarki <b>Halal</b> Dibasmi
2.	DKA 3.11	Tukang Kayu Paling Benar Cuma <b>Yesus</b> Cui
3.	DKA 4.14	DPR Jangan Mau Ikut-Ikut Jokowi Kena <b>Azab</b>

Kata *halal* (data DKA 2.5) memiliki makna literal sesuatu yang tidak dihalangi Allah dan tidak menjadi sebuah kesalahan (Buang & Hamidon, 2016). Dalam slogan *Keluarga Oligarki Halal Dibasmi*, kata *halal* menunjukkan sifat sah dari tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut digambarkan melalui kata kerja pasif *dibasmi*, sedangkan frasa *keluarga oligarki* menjadi objek yang menerima tindakan. Representasi yang ditampilkan penulis adalah tindakan penghapusan praktik dinasti politik. Frasa *halal dibasmi* berfungsi untuk mempertegas makna wacana bahwa tindakan penghapusan praktik demokrasi boleh dilakukan dan disahkan agama. Ditinjau dari konteks penggunaan kata *halal* dalam agama Islam, penulis slogan seolah meyakini praktik dinasti politik sebagai perbuatan yang mengancam dan tidak sesuai perintah Allah, sehingga harus dihilangkan.

Jika kata *halal* pada wacana sebelumnya berbentuk kata sifat, kata *Yesus* pada wacana slogan *Tukang Kayu Paling Benar Cuma Yesus Cui* (DKA 3.11) menggambarkan bentuk nomina. Wacana ini memiliki struktur kalimat, di mana frasa *tukang kayu paling benar* berperan sebagai subjek yang menjadi fokus wacana. Selaras dengan pernyataan (Utamy et al., 2024) yang menyatakan bahwa kata *paling* digunakan untuk menandai makna perbandingan yang teratas atau superlatif. Frasa *cuma Yesus cui* menduduki posisi predikat yang menunjukkan sifat dari subjek. Perlu disorot

penggunaan kata *cuma* sebagai kosakata yang memberi batasan. Frasa itu menunjukkan bahwa hanya terdapat satu *tukang kayu* yang benar, yaitu Yesus. Kosakata *Yesus* secara semantik bermakna wujud Allah dalam konteks agama Kristen yang turun ke dunia dalam pribadi manusia (Haryadi & Martasudjita, 2024). Kata *Yesus* merujuk pada tokoh bermoral tinggi sebagai standar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Latar belakang penyebutan *tukang kayu* terhadap figur Yesus diambil dari kitab suci agama Kristen yang menyebutkan bahwa Yesus bekerja sebagai tukang kayu (Tamyong, 2021). Namun perlu diingat kembali, frasa *tukang kayu* (data DKM 2.3) jika dihubungkan dengan konteks demonstrasi terhadap revisi UU Pilkada merupakan metafora yang merujuk pada tokoh Jokowi. Meskipun kedua tokoh memiliki sebutan *tukang kayu*, terdapat perbedaan yang ingin penulis sampaikan. Penulis memosisikan dirinya sebagai kritikus yang mengharapkan pemimpin negara yang memiliki karakter Yesus. Melalui wacana slogan tersebut, penulis merepresentasikan kekecewaannya terhadap Jokowi yang dinilai tidak memenuhi standar sebagai pemimpin bermoral.

Adapun kata *azab* (DKA 4.14) secara leksikal bermakna siksa Tuhan yang diganjarakan kepada manusia yang melanggar larangan agama. Dalam konteks wacana slogan demonstrasi, frasa *kena azab* menciptakan konotasi negatif sebagai peringatan tentang konsekuensi dari tindakan yang mengikuti aktor DPR. Frasa *jangan mau ikut-ikutan Jokowi* menduduki posisi sebagai predikat yang menggambarkan tindakan atau sikap yang diharapkan penulis dari anggota DPR. Wujud kalimat imperatif larangan dalam wacana ini ditunjukkan dengan kata *jangan* (Wulandari, 2021). Penggunaan kata *jangan* menunjukkan adanya seruan kepada aktor utama, yaitu DPR untuk tidak terpengaruh pada kekuasaan Jokowi. Tindakan pelarangan tersebut diperjelas dengan tambahan informasi mengenai ancaman dan konsekuensi bagi pihak yang melanggar, ditandai dengan frasa *kena azab* sebagai pelengkap. Wacana ini merepresentasikan bentuk peringatan dan penolakan terhadap sikap atau kebijakan revisi UU Pilkada yang dikeluarkan DPR.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Kreil (2021) bahwa wacana protes yang ditelitinya tidak merepresentasikan individu atau kelompok tertentu sebagai pihak yang bersalah. Hal itu dapat terjadi karena perbedaan konteks dan tujuan pembuatan slogan. Dalam penelitiannya, Kreil (2021) mendapati bahwa demonstran lebih berfokus menyuarakan dampak negatif dari permasalahan yang ditujukan untuk masyarakat secara luas, tanpa menyinggung pemerintah atau lembaga terkait. Sebaliknya, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa slogan-slogan protes kebijakan seperti penolakan revisi UU Pilkada cenderung menempatkan individu atau kelompok tertentu sebagai penyebab permasalahan. Seperti pada Tabel 2 yang memuat beberapa kata dan frasa sebagai bentuk representasi individu atau kelompok di antaranya, yaitu *Keluarga Oligarki*, *DPR*, dan *Jokowi*. Dalam konteks tersebut, slogan-slogan yang muncul tidak hanya untuk menyebarkan informasi terkait permasalahan kebijakan, tetapi juga sebagai ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Kombinasi anak kalimat akan membentuk koherensi yang lengkap tentang ideologi pencipta teks (Putikadyanto & Laila, 2022). Pada Tabel 3, terdapat data-data yang menunjukkan adanya dua anak kalimat yang digabung dan membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai, biasa disebut dengan koherensi. Salah satu bentuk koherensi adalah elaborasi atau penjelasan anak kalimat yang satu oleh anak kalimat yang lain (Setiawan et al., 2022).

**Tabel 3. Data Tekstual Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat**

No.	Nomor Data	Wacana
1.	DKE 1.7	Mba Er...Rotimu yang 400 Ribu itu Gaji Guru Honorer Sebulan!
2.	DKE 2.12	Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi

Wacana *rotimu yang 400 ribu itu gaji guru honorer sebulan* (data DKE 1.7) pada tabel di atas menampilkan adanya bentuk elaborasi ditandai dengan penggunaan kata hubung *yang* sebagai penunjuk bahwa anak kalimat selanjutnya merupakan kalimat perinci. Kata hubung *yang* dalam anak kalimat *rotimu yang 400 ribu* digunakan untuk menguraikan informasi tentang harga roti. Representasi yang ditampilkan dalam kombinasi anak kalimat adalah ketimpangan kesejahteraan

sosial yang terjadi di Indonesia, terutama bagi tenaga pendidik. Penulis slogan menampilkan rendahnya penghasilan atau *gaji guru honorer* yang setara dengan harga roti. Ketimpangan sosial sebagai ideologi inti yang dibangun penulis sering kali tidak disadari oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Penulis berusaha membangun relasi kritik terhadap anggota keluarga penguasa atau dinasti politik. Dengan menyoroti gaya hidup mewah melalui harga roti yang mahal, penulis secara implisit mengkritik kelompok elit pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap kesenjangan sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, penulis berusaha memosisikan dirinya sebagai pihak yang peduli terhadap kesejahteraan kaum berpenghasilan rendah, khususnya guru honorer. Terlihat dari kalimat yang bermakna kritikan, penulis menempatkan dirinya sebagai wakil suara rakyat yang menolak ketimpangan sosial ekonomi.

Konjungsi subordinatif *tanpa* pada wacana (DKE 2.12) berfungsi untuk menunjukkan keterangan cara atau kondisi. Frasa *tanpa dinasti Jokowi* merupakan anak kalimat yang berperan sebagai keterangan yang memerinci maksud dari anak kalimat pertama, yaitu *Indonesia Baru*. Dalam semantik, kata baru memiliki makna belum pernah ada sebelumnya. Jika dikaitkan dengan konteksnya, kata *baru* bermakna gambaran kondisi Indonesia yang diharapkan penulis, yaitu bebas dari dinasti politik. Frasa *dinasti Jokowi* merepresentasikan kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan dianggap tidak memberikan kesempatan merata bagi pihak lain. Slogan ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak setara antara rakyat dan keluarga penguasa, dengan keluarga penguasa dianggap sebagai pihak yang membatasi ruang demokrasi di Indonesia. Kata *tanpa* menekankan penolakan atau penghapusan sesuatu. Dalam hal ini, kutipan *tanpa dinasti Jokowi* menunjukkan keinginan untuk melepaskan negara dari pengaruh politik keluarga tertentu yang dipandang membatasi kebebasan politik Indonesia. Dengan jenis kalimat deklaratif yang berfungsi menyampaikan informasi, wacana slogan ini merepresentasikan keinginan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan berdaulat tanpa intervensi keluarga atau penguasa tertentu. Penulis dalam wacana ini mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari rakyat yang mendukung perubahan politik dan menentang monopoli kekuasaan yang berpusat pada satu keluarga. Dengan demikian, penulis menampilkan dirinya sebagai pendukung demokrasi dan kebebasan politik yang tidak dipengaruhi kekuasaan tertentu.

## 2. Dimensi Praktik Wacana

Praktik wacana merupakan analisis terhadap cara penulis membentuk suatu ide dengan masih memperhatikan konteks pembicaraan (Kabanga, 2024; Kabanga et al., 2024). Dalam analisis praktik wacana atau diskursus, penting untuk melihat tahap produksi dan konsumsi teks. Aspek yang dapat diperhatikan untuk menganalisis proses produksi teks, yaitu dengan melihat hubungan antara penulis dan organisasi, cara penulis menyampaikan wacana slogan, serta posisi penulis dalam wacana (Eriyanto, 2015).

**Tabel 4. Data Diskursif Produksi Teks**

No.	Nomor Data	Wacana
1.	DKP 1.8	...Rakyat <b>Melawan!</b>
2.	DKP 2.13	Kami Putra Bangsa Indonesia Menyatakan <b>Perang</b> Dengan Pembangkang Konstitusi!
3.	IPKP 9.14	<b>DPR</b> Jangan Mau Ikut-Ikut Jokowi Kena Azab

Kondisi sosial yang terungkap dalam wacana sebagaimana data pada Tabel 4 menjelaskan adanya hubungan oposisi biner, yaitu atas dan bawah. Mahasiswa, yang dimaknai dari beberapa kata dan frasa seperti *melawan* (data DKP 1.8) dan *menyatakan perang* (data DKP 2.13), menunjukkan perannya sebagai pihak atas yang menggerakkan aksi. Adapun wacana slogan *DPR Jangan Mau Ikut-Ikut Jokowi Kena Azab* (data IPKP 9.14) menunjukkan bahwa penulis mengancam kebijakan yang diputuskan pemerintah, ditandai dengan kata *DPR* sebagai pihak sasaran penulisan. Citra yang terbentuk melalui wacana tersebut adalah mahasiswa sebagai pembela demokrasi. Melalui praktik penyaluran kritik, akan terlihat struktur sosial yang berbeda, yaitu

mahasiswa yang menunjukkan kendalinya sebagai pemroduksi ideologi dalam wacana. Sementara pembaca yang mencakup beberapa elemen seperti masyarakat, akademisi, DPR, dan pemerintah sebagai pihak bawah yang mengonsumsi ideologi tersebut.

Mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan di setiap kampus memegang peran penting dalam membangun diskursus oposisi terhadap pemerintah. Kemampuan organisasi mahasiswa dalam mengumpulkan ribuan massa bergantung pada proses penyebaran informasinya. Semakin mudah akses informasi terkait aksi demonstrasi, semakin banyak pula massa yang akan terkumpul (Syifa et al., 2020). Organisasi Kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari setiap kampus memiliki peran krusial dalam proses mediasi informasi mengenai demonstrasi. Sebagian besar mahasiswa mengetahui informasi terkait isu-isu politik melalui media sosial, salah satunya, yaitu X (Twitter). Penelitian oleh Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI (2019) menguatkan bahwa mahasiswa pengguna media sosial X memiliki skor pemahaman tentang tuntutan demonstrasi yang lebih tinggi, daripada mereka yang tidak menggunakan X. Melalui media sosial X, informasi mengenai kontroversi UU Pilkada 2024 dapat lebih mudah diakses dan disebar.

Penelitian ini membantah pernyataan Hasibuan & Khairani (2021) bahwa sebagai pembuat wacana slogan, mahasiswa tidak mementingkan proses penyampaian makna kepada masyarakat. Dalam penelitiannya, mahasiswa disimpulkan hanya berfokus pada penyampaian aspirasi menggunakan bahasa anak muda yang lebih mengarah pada hal-hal vulgar seputar seksualitas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memproduksi wacana solidaritas yang bermakna. Melalui proses produksi slogan yang melibatkan tahap pemilihan bahasa, mahasiswa tidak hanya sekedar menyampaikan kritik, tetapi juga membangun narasi perjuangan. Seperti ditunjukkan pada beberapa wacana, yaitu *Mari Bung Rebut Kembali!* (DKM 1.2), *Rakyat Melawan!* (DKP 1.8), dan *Kami Putra Bangsa Indonesia* (DKP 2.13). Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif memproduksi wacana solidaritas untuk mendorong kesadaran kolektif di masyarakat.

Tabel 5. Data Diskursif Konsumsi Teks

No.	Nomor Data	Wacana
1.	RTSO 6.8	Miris! Punya <b>Pemerintah</b> Urat Malunya Sudah Putus Terang-Terangan Mengebiri Demokrasi. Rakyat Melawan!
2.	RTSO 8.10	Satu Negara Kalah Sama <b>Satu Keluarga</b>

Proses konsumsi wacana dimulai dari interpretasi terhadap isi wacana slogan. Interpretasi pada kutipan wacana dalam Tabel 5 menunjukkan pemerintah sebagai aktor yang memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Masyarakat diinterpretasikan sebagai korban yang tidak sejahtera dan dirugikan akibat kebijakan. Penulis tampak memosisikan dirinya sebagai pengamat kritis yang memperhatikan pengaruh dinasti politik dalam pemerintahan. Melalui penggunaan frasa *satu keluarga* (data RTSO 8.10) penulis mengungkapkan kritiknya terhadap praktik nepotisme atau dinasti politik yang dinilai melemahkan kedaulatan negara. Adapun ungkapan *miris* (data RTSO 6.8) memperlihatkan ekspresi ketidakpuasan penulis terhadap pemerintah, yang dianggap telah *mengebiri demokrasi* demi kepentingan tertentu. Kutipan wacana tersebut juga menciptakan gambaran bahwa penulis mewakili masyarakat merasa kehilangan hak-haknya dan tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah.

Analisis diskursif konsumsi teks menunjukkan bahwa dalam praktik wacana, penulis slogan yang merujuk pada mahasiswa berperan sebagai penggerak ideologi melalui produksi teks yang disebarluaskan. Sementara masyarakat menjadi pihak yang mengonsumsi wacana tersebut. Interpretasi yang muncul merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Media sosial sebagai sarana penyampaian wacana menjadi instrumen penting untuk membentuk opini publik dan memperluas jangkauan ideologi yang disuarakan mahasiswa.

Dengan ditemukannya fungsi slogan sebagai pembentuk opini publik, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Samosir et al., 2016). Dalam penelitiannya, telah

ditemukan pengaruh variasi penggunaan bahasa dalam slogan terhadap interpretasi publik. Masyarakat yang mengonsumsi teks tersebut tidak hanya menginterpretasikan pesan, tetapi juga terdorong untuk bertindak sesuai isi wacana. Penelitian ini sejalan karena dengan ungkapan kritik yang disuarakan melalui slogan, masyarakat yang mengonsumsi wacana tidak hanya sampai pada tahap menginterpretasikan bahwa kebijakan revisi UU Pilkada 2024 dapat berdampak negatif bagi mereka, tetapi juga turut andil dalam memperjuangkan pembatalannya. Dalam konteks ini, masyarakat khususnya pengguna media sosial X tidak hanya menerima pesan slogan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyebarkan wacana tersebut melalui tagar-tagar seperti #PeringatanDarurat dan #KawalPutusanMK. Proses ini sudah termasuk pada tahap distribusi yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginterpretasikan isi wacana, tetapi juga ikut memperjuangkan nilai yang disuarakan.

Analisis diskursif pada penelitian ini semakin menegaskan pentingnya pemilihan bahasa dalam slogan, agar pihak yang mengonsumsi teks dapat memahami pesan dan tergerak untuk bertindak sesuai dengan isi wacana. Dengan bahasa yang tepat, slogan mampu menciptakan efek persuasi, baik untuk membangun kesadaran publik maupun untuk memengaruhi pengambil kebijakan.

### 3. Dimensi Sosiokultural

Dalam menganalisis dimensi sosiokultural wacana dirumuskan tiga aspek, yaitu aspek situasional, institusional, dan sosial (Sholikhati, 2017). Ketiga aspek tersebut akan membentuk kerangka untuk mengetahui ideologi yang tercermin dalam wacana slogan demonstrasi terhadap perubahan UU Pilkada 2024.

#### a. Aspek Situasional

Pada tahap situasional, wacana slogan diproduksi dalam suatu kondisi yang spesifik. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, wacana slogan dipengaruhi keadaan politik yang sama, yaitu pada kondisi masyarakat yang diresahkan dengan isu dinasti politik menjelang pemilihan kepala daerah 2024. Dengan munculnya isu dinasti politik yang ramai diperbincangkan khususnya di media sosial X, mahasiswa bersama dengan seluruh elemen masyarakat melakukan demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi dan penolakan terhadap revisi UU Pilkada 2024. Aksi demonstrasi yang lebih dikenal dengan aksi “Peringatan Darurat” ini dilakukan secara serentak mulai dari tanggal 22 Agustus 2024 di depan gedung DPR/MPR RI Jakarta. Kemudian disusul oleh demonstrasi untuk mengawal keputusan di beberapa wilayah lainnya hingga tanggal 26 Agustus 2024. Dari situasi tersebut, muncullah beragam wacana slogan yang tujuannya lebih banyak mengkritik kebijakan revisi UU Pilkada. Melalui slogan, para demonstran menggunakan kekuasaannya untuk menentukan posisi dukungannya terhadap rakyat dan demokrasi.

Wacana slogan dapat menjadi pengaruh dan refleksi praktik sosial dalam masyarakat. Seperti pada wacana slogan *Bobrohnya Sistematis, Pemimpinnya Apatitis, Aparatnya Sadis, Rakyatnya Miris* (data RTSO 3.4) yang menggambarkan situasi demonstrasi yang tidak kondusif karena bentrokan sering kali terjadi. Situasi ini membuat mahasiswa mengungkapkan kritiknya terhadap tata kelola politik yang dinilai tidak memperhatikan hak rakyat dan terlalu berambisi melanggengkan kekuasaan politik. Kata-kata *apatitis* dan *sadis* menggambarkan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pihak dominan terhadap rakyat. Dalam situasi demo yang tidak kondusif ini, telah ditemukan banyak kecaman terhadap tindakan represif aparat pada media sosial X. Dikutip dari BBC, tindakan represif aparat polisi yang menggunakan kekerasan untuk menangani demonstran merupakan akibat dari minimnya pengawasan pemerintah (Saputra & Kamal, 2024). Masyarakat menyoroti bagaimana tindakan pemerintah yang kurang tanggap dalam menangani masalah yang muncul saat demonstrasi, di antaranya seperti demonstrasi yang tidak kondusif, aparat yang menggunakan kekerasan, dan intimidasi terhadap jurnalis.

Selain sebagai refleksi praktik sosial dalam masyarakat, wacana slogan juga digunakan untuk mengkritik ketimpangan sosial di Indonesia. Slogan *Mba Er...Rotimu yang 400 Ribu itu Gaji Guru Honorer Sebulan!* (data RTSK 2.7) merupakan salah satu bentuk penyampaian kritik terhadap masalah kesejahteraan rakyat. Dalam konteks jelang Pilkada 2024, unggahan kontroversial terkait kemewahan Erina Gudono menantu Jokowi di media sosial dijadikan penulis wacana slogan sebagai referensi atau latar belakang dalam menulis wacana slogan tersebut. Demontran memanfaatkan kontroversi tersebut untuk memperlihatkan bahwa realitas hidup masyarakat umum sangat berbeda dengan kemewahan yang dimiliki kaum elit politik. Penulis menjadikan perbandingan kemewahan itu untuk menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

### **b. Aspek Institusional**

Aspek institusional berguna untuk melihat pengaruh institusi baik dari masyarakat, partai politik, pejabat, atau organisasi mahasiswa dalam memproduksi wacana slogan. Ideologi yang dimiliki instansi tersebut akan berperan membentuk wacana politik dalam situasi demonstrasi dan penolakan terhadap revisi UU Pilkada 2024. Menurut Karl Max dalam (Haryatmoko, 2016) ideologi sebuah institusi dapat dipetakan melalui beberapa skema, salah satunya aspek keanggotaan yang dapat dilihat dari kosa kata yang menegaskan representasi kelompok tertentu.

**Tabel 6. Data Ideologi Institusi**

No.	Nomor Data	Wacana
1.	RTSO 4.5	<b>Keluarga Oligarki</b> Halal Dibasmi
2.	RTSO 10.12	Indonesia Baru Tanpa <b>Dinasti Jokowi</b>
3.	RTSO 11.13	Kami Putra Bangsa Indonesia Menyatakan Perang Dengan <b>Pembanggang Konstitusi!</b>

Sebagai pihak yang menjembatani aspirasi, pesan atau ideologi yang ingin disampaikan demonstran dapat dilihat melalui beberapa bentuk, seperti orasi, yel-yel, dan slogan (Zanynu, 2020). Melalui analisis yang sudah dilakukan terhadap slogan demonstrasi penolakan revisi UU, dapat dilihat adanya kesan negatif yang merepresentasikan pemerintah sebagai pihak yang merusak demokrasi Indonesia. Dari Tabel 6 ditemukan data berupa kosakata keanggotaan yang menegaskan representasi kelompok tertentu, di antaranya *keluarga oligarki*, *dinasti Jokowi*, dan *pembanggang konstitusi*. Kosakata itu mencerminkan kritik terhadap konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau dinasti, terutama dalam hal ini terkait dengan kekuasaan Jokowi dan keluarganya. Analisis ideologi mahasiswa dalam konteks penolakan terhadap revisi UU Pilkada 2024 menunjukkan bahwa mereka menentang adanya praktik oligarki dalam sistem politik. Wacana tersebut memperlihatkan sikap mahasiswa yang menginginkan perubahan sistem politik yang lebih terbuka dan adil, serta menentang keberlangsungan kekuasaan yang dianggap menghambat perbaikan demokrasi.

Ideologi mahasiswa terkait dengan penolakan terhadap dinasti politik berhubungan erat dengan pandangan mereka tentang demokrasi. Mahasiswa memandang sistem politik transparan yang seharusnya memberikan kesempatan setara bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi. Keinginan mereka untuk menghilangkan dinasti politik merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat yang ingin melihat sistem politik yang lebih adil. Melalui demonstrasi, mahasiswa berusaha membuka pandangan masyarakat tentang kondisi demokrasi dalam situasi menjelang Pilkada 2024. Hal ini selaras dengan pernyataan Jiwandono & Oktaviyanti (2020) yang menyatakan bahwa mahasiswa berperan sebagai agen perubahan atau pihak kontrol sosial terhadap kebijakan negara.

Selain mahasiswa, terdapat organisasi masyarakat juga yang bergabung untuk melakukan demonstrasi. Salah satunya adalah Forum Betawi Intelek (FBI) atau organisasi perkumpulan kaum betawi yang ikut menyatakan penolakannya terhadap revisi UU Pilkada 2024. Adapun visi organisasinya, yaitu menciptakan kehidupan warga betawi yang lebih beradab. Ideologi yang dimiliki organisasi tersebut akan memengaruhi penulisan wacana dalam slogan. Dari kutipan

wacana slogan *Jangan Mentang-Mentang Tukang Kayu Semua Partai Mau Digergaji!* (data RTSK 1.3), dapat dianalisis ideologi yang dimiliki organisasi masyarakat Forum Betawi Intelek. Wacana slogan tersebut mencerminkan ideologi yang menentang tindakan yang dianggap merugikan kelompok atau pihak tertentu, dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan partai politik di luar koalisi. Penulis slogan mengindikasikan ketidaksetujuannya terhadap upaya yang dianggap merusak tatanan sosial atau politik yang ada, serta menunjukkan adanya keberpihakan terhadap kelompok tertindas dalam konteks politik lokal.

### c. Aspek Sosial

Aspek sosial bertujuan untuk menjelaskan sistem politik dan budaya yang memengaruhi proses terbentuknya wacana. Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pilkada 2024, terdapat kecenderungan sistem yang membatasi partisipasi demokratis dan dianggap melanggar kekuasaan kelompok tertentu. Sistem sosial politik dapat tercermin dalam hubungan antar elemen seperti pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Melalui kebijakan politiknya, pemerintah dianggap sebagai pihak dominan yang mengabaikan kepentingan kelompok kecil. Kondisi itu dapat berimbas pada ketidakpuasan masyarakat, sehingga akan memunculkan wacana penolakan.

Proses revisi UU Pilkada yang disetujui oleh DPR merupakan salah satu bentuk bobroknya sistem politik, sehingga memicu terbentuknya wacana penolakan. Revisi UU Pilkada terkait perubahan ambang batas suara pencalonan kepala daerah memberikan kesan bahwa partai yang tidak memenuhi batas suara dan di luar koalisi, tidak akan bisa mencalonkan kandidatnya. Sebagai hasilnya, partai besar dan pemerintah memegang kendali lebih besar dalam menentukan calon yang dapat berkompetisi, sementara yang lainnya terpinggirkan. Selain itu, revisi UU Pilkada juga menetapkan perubahan batas usia minimal 30 tahun pada saat pelantikan. Perubahan itu dianggap sebagai langkah politis yang menguntungkan tokoh tertentu, termasuk anak mantan Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang usianya belum mencukupi menurut UU Pilkada sebelumnya. Kebijakan yang diproduksi pemerintah itu dianggap memperlihatkan keberpihakan pada kelompok tertentu, sehingga mendorong terbentuknya wacana di kalangan mahasiswa dan kelompok yang peduli terhadap demokrasi. Wacana penolakan ini juga dipengaruhi oleh budaya protes yang berkembang dalam masyarakat. Salah satunya melalui aksi demonstrasi untuk menyalurkan wacana ketidakpuasan dan sebagai usaha mengubah sistem politik yang tidak adil (Syofian et al., 2023).

Selain sistem politik, sistem budaya juga dapat memengaruhi terhipungnya aksi demonstrasi. Mahasiswa, sebagai pihak yang menginisiasi aksi demonstrasi sudah mulai lebih aktif dalam menyuarakan ketakpuasannya dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebudayaan organisasi kemahasiswaan yang mendukung isu-isu seperti kebebasan berpendapat dan reformasi politik (Syofian et al., 2023). Budaya organisasi tersebut akan memungkinkan mahasiswa untuk mengambil tindakan dan memimpin suatu perubahan. Dalam konteks penolakan revisi UU Pilkada 2024, kemunculan demonstrasi yang diikuti mahasiswa dan organisasi intelektual ini membuktikan bahwa kaum akademisi memiliki pengetahuan dan empati yang tinggi terhadap demokrasi di Indonesia. Hal itu selaras dengan penelitian oleh Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan demonstran akan memengaruhi motif mereka dalam mengikuti demonstrasi. Sebagai hasil dari demonstrasi yang dilakukan bertahap di seluruh wilayah Indonesia, serta kemudahan akses ke sosial media, revisi UU Pilkada resmi dibatalkan pada tanggal 22 Agustus 2024.

Dalam wacana slogan demonstrasi, ideologi yang tercermin tidak hanya dipengaruhi oleh institusi atau kebijakan yang menjadi objek kritik, tetapi juga oleh dinamika sosial masyarakat yang mengonsumsinya. Sejalan dengan temuan Aminudin (2023) terkait praktik sosial budaya dalam wacana penundaan pemilu 2024. Aminudin (2023) menunjukkan peran struktur sosial dan relasi kuasa dalam membentuk wacana publik, termasuk memunculkan forum perdebatan dari berbagai pihak seperti para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Penelitian ini memperluas temuan

tersebut dengan menemukan bahwa wacana slogan penolakan revisi UU Pilkada 2024 yang disebarkan melalui media sosial X dapat berdampak untuk memobilisasi massa. Sama seperti dalam wacana penundaan pemilu yang menggiring opini publik untuk mempertahankan legitimasi pemilu serentak, slogan demonstrasi terhadap perubahan UU Pilkada berhasil menciptakan tekanan politik hingga mendorong pembatalan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa slogan dalam praktiknya tidak hanya mencerminkan ideologi, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial dengan membentuk opini publik dan memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat kebijakan.

#### **D. Penutup**

Ideologi dalam slogan demonstrasi mahasiswa terkait Pilkada 2024 mencerminkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan anti-oligarki. Melalui media sosial X, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap melanggengkan dinasti politik dan menghambat demokrasi ideal. Dimensi teks menunjukkan bahwa kosakata yang berbentuk metafora dan pola struktur kalimat khusus digunakan untuk membingkai kritik terhadap ketimpangan sosial dan kekuasaan, sekaligus untuk menghimpun solidaritas rakyat. Pada dimensi praktik wacana, mahasiswa berperan sebagai agen penggerak ideologi anti dinasti politik dengan memanfaatkan slogan sebagai alat mobilisasi massa. Dimensi sosiokultural mengungkap pengaruh keresahan masyarakat terhadap dinasti politik, kebijakan kontroversial pemerintah, dan dukungan terhadap demokrasi yang lebih adil. Wacana ini juga menyoroti budaya demonstrasi mahasiswa sebagai sarana ekspresi ideologi perlawanan yang mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, wacana slogan mahasiswa tidak hanya mencerminkan kritik terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk harapan masyarakat akan perbaikan demokrasi di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Alam, S. (2018). Representasi Ideologi Republika Melalui Wacana Berita Kontestan Politik Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua. *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 86–99. <https://doi.org/10.30813/s:jk.v12i1.1545>
- Aminudin, A. (2023). Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 57–72. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4407>
- Buang, A. H., & Hamidon, S. F. (2016). Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang. *AL-BASIRAH*, 6(1), 49–61. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/18962>
- Chatti, S. (2019). Metaphorizing Deception in Political Communication : The Wall Metaphor in Tunisian Electoral Politics as a Case Study. *International Journal of Media & Cultural Politics*, 15(1), 69–85. [https://doi.org/10.1386/macp.15.1.69\\_1](https://doi.org/10.1386/macp.15.1.69_1)
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fairclough. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman Group Limited.
- Fransisca, A. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Dalam Terjemahan Drama ‘Audatul Firdaus Karya Ali Ahmad Bakatsir (Konservatif Budaya Melalui Karya Sastra). *An-Nas*, 7(1), 37–46. <https://doi.org/10.32665/annas.v7i1.2036>
- Handarini, I., Saddhono, K., & Anindyarini, A. (2018). Novel Jokowi Si Tukang Kayu Karya Gatotkoko Suroso Sebagai Materi Ajar Apresiasi Sastra di SMA: Kajian Psikologi Sastra dan Nilai Karakter. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(1), 216–231. <https://doi.org/10.20961/basastra.v6i1.37716>

- Haryadi, D. S., & Martasudjita, E. P. D. (2024). Makna Pengosongan Diri Allah Trinitas dalam Perspektif Jawa: Analisis Semiotik dan Teologis atas Tokoh Semar dan Yesus Kristus. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 11(1). <https://doi.org/10.33550/sd.v11i1.448>
- Haryatmoko. (2016). *Analisis Wacana Kritis: Landasan Teori, Metode, dan Penerapan*. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, I. A., & Khairani, A. I. (2021). Hegemoni Bahasa Milenealisasi Pada Slogan Demonstrasi: Analisis Wacana Kritis. *Konfiks Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(2), 9–16. <https://doi.org/10.26618/konfiks.v7i2.4294>
- Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP Dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis Dan Narsis. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 154–162. <https://doi.org/10.30762/asketik.v4i1.1000>
- Kabanga, L. (2024). Ideologi dalam Pesan Natal 2023: Pendekatan Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Fairclough. *Journal of Literature and Education*, 2(1), 9–18. <https://doi.org/10.69815/jle.v2i1.23>
- Kabanga, L., Tabuni, S., & Kalangi, A. N. (2024). Ideologi dalam Pesan Paskah 2023 : Pendekatan Analisis Wacana Kritis dengan Model Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(4), 1095–1110. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i4.792>
- Kreil, A. S. (2021). Visual Protest Discourses on Aviation and Climate Change. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2021.100015>
- Lesmana, M. D., & Hidayatullah, S. (2021). Makna Figuratif Pada Slogan Unjuk Rasa RKHUP Di Media Online Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.30659/jpbi.9.1.1-12>
- Lou, J. J., & Jaworski, A. (2016). Itineraries of Protest Signage. *Journal of Language and Politics*, 15(5), 609–642. <https://doi.org/10.1075/jlp.15.5.06lou>
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>
- Muttaqin, M. Z., & Sriyono, S. (2021). Konstruksi Opini Publik melalui Media Sosial: Studi Pendekatan Analisis Wacana Kritis Grup Facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura pada Bulan Juni 2021. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 113–129. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.113-129>
- Ningsih, R. Y., Sari, R. D., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik. *Journal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–8. <https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/308>
- Permita, M. R. (2019). Bencana Lumpur Lapindo: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jalabahasa*, 15(2), 190–202.
- Putikadyanto, A. P. A., & Laila, Y. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Berita: Analisis Pemberitaan Tindak Kekerasan Perawat Christina Ramauli Simatupang Di Media Nasional Indonesia. *Lingua: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 18(2), 157–170. <https://doi.org/10.15294/lingua.v18i2.37154>
- Qorib, F., & Aminulloh, A. (2017). *Wacana Berita Hoax Pilkada DKI Jakarta*. <https://core.ac.uk/download/pdf/339156729.pdf>

- Rolyna, I. (2022). Perubahan Sapaan di Kalangan Remaja (Studi Kasus Sapaan pada Film Remaja Indonesia Tahun 1977-1979 dan 2019-2021). *Deskripsi Bahasa*, 5(2), 58–72. <https://doi.org/10.22146/db.v5i2.5847>
- Sabandar, G., Rasiqah, M., Amalia, B. A., & Talitha, S. (2023). Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/456>
- Samosir, D. K., Nurhayati, K., & Maulana, S. (2016). Hegemoni Penggunaan Bahasa Inggris dalam Slogan Perguruan Tinggi (Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Slogan Dua Universitas Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Sosioteknologi*, 15(1), 124–135. <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1538>
- Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2022). Ideologi Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 di Berita Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 603–618. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>
- Saputra, Y., & Kamal. (2024, September 8). Repetisi ‘Brutalitas Polisi’ Dalam Demonstrasi Revisi UU Pilkada, Mengapa Terus Berulang? *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o>
- Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program “Somasi.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.44-58>
- Setiawan, D., Wibisono, B., & Astuti, S. Y. (2022). Ketidaksetaraan Gender dalam Program FTV Suara Hati Istri: Suatu Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(2), 94–108. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i2.30730>
- Sholikhati, N. I. (2017). Pemberitaan Kasus Korupsi Pada Media Metro TV dan Net Melalui Perspektif Analisis Wacana Kritis. *Caraka: Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, Dan Pembelajarannya*, 5(1), 36–51. <https://doi.org/10.30738/caraka.v5i1.4001>
- Suriadi, & Baharman. (2024). Nilai Eksperensial dalam Kosakata Ujaran Kebencian di Twitter : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(4), 4541–4558. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i4.4756>
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Syifa, S. H., Wijianto, A., & Ihsaniyati, H. (2020). Tingkat Partisipasi Petani dalam Demonstrasi Area Budidaya Tanaman Sehat Padi di Kabupaten Boyolali. *Prosiding Ilmu-Ilmu Peternakan*, 235–246. <http://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/pros/article/view/462>
- Syofian, D. A., Ma'rifa, G. S., Gunawan, M. J. L., & Muslih, S. A. (2023). Etika Mahasiswa dan Ideologi Liberalisme: Apakah Nilai-nilai Liberal Memengaruhi Pilihan dan Aksi Mahasiswa? *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2127–2133. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5608>
- Tamyong, R. (2021). Kemanusiaan Yesus Kristus. *Jurnal Metalogia*, 1(2), 24–34. <http://jurnal.sttiipalu.ac.id/index.php/home/article/view/8>
- Tarmini, W., & Sulistyawati. (2019). *Sintaksis Bahasa Indonesia*. UHAMKA Press.
- Tim Peneliti KANOPI FEB UI & Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI. (2019). Di Balik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik. *Jurnal KSM Eka Prasetya UI*, 1(1), 1–23. <https://ksm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/PENELITIAN-CR-KANOPI-X-KSM.pdf>

- Utamy, A., Maharani, F., Rawia, K., Khairunnisa, Cantika, L., Anjani, S. R., Susanti, Khairunnisa, S., & Bintang, T. K. (2024). Analisis Kesalahan Berbahasa Komunikasi Melalui Media Whatsapp Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia 2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1697–1704. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12631>
- Wenda, D., Kabanga, L., & Labobar, M. W. (2022). Fungsi Bahasa pada Konten Khotbah Pengkhotbah di Jemaat-Jemaat Lingkungan Kota Klasis Sentani. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(4), 793–806. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i4.483>
- Wulandari, S. (2021). Kalimat Imperatif Dalam Novel Selena Karya Tere Liye (Kajian Sintaksis). *Jurnal PENEROKA*, 1(01), 134–150. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v1i01.748>
- Zanynu, M. A. (2020). Memori Reformasi dalam Film Dokumenter “Mosi Tidak Percaya” (2019). *Avant Garde*, 8(1), 33–45. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/avantgarde/article/view/1027>



**Open Access** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA 4.0 license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.